

The Exclusivism of the Evangelical Church in Indonesia and the Spirit of Pluralism in Pancasila: Can the Two Go Together?

Indra Kurniadi Tjandra,^{1*} Yusuf Deswanto,²

¹⁾ Gereja Kristen Indonesia Jemaat Kota Modern, Tangerang, Indonesia

²⁾ Persekutuan Mahasiswa Antar Universitas, Jember, Indonesia

^{*}maskoki2004@gmail.com

Abstract: Pancasila is a political compromise that allows Indonesia as a nation to continue to walk together in various religious beliefs (Islam, Buddhism, Hinduism, Confucianism, Protestantism, Catholicism, and others who believe in the One God). On the other hand, the teachings and practices of the evangelical church in Indonesia, especially those related to the basic doctrine of salvation and the practice of evangelism, are often considered contrary to the values of Pancasila. This study aims to show that the fundamental beliefs of the evangelical church do not conflict with the spirit of diversity in Pancasila. Our thesis is that the basic evangelical doctrines and practices are not in conflict with the inclusivism of Pancasila, because the history of the formation of Pancasila is largely influenced by neo-modernist Muslims who were likewise exclusivist in their theology. The approach taken in this study is to explore the historical roots of the evangelical movement in the world to Indonesia, which is then compared with the history of the birth of Pancasila, to demonstrate coherence between evangelical teachings and praxis to the values of Pancasila.

Research Highlights:

- The main contribution of this article is showing how the exclusivist nature of most world religions, including evangelical Christianity, does not necessarily conflict with the inclusive value of Pancasila toward the fact of (religious) diversity in Indonesia.
- The historical investigation undertaken in this study towards both evangelicalism and the formation of Pancasila helps readers to see how tolerance and evangelism need not be considered contradictory.

Article history

Submitted 20 May 2022

Revised 20 March 2023

Accepted 24 March 2023

Keywords

Evangelicalism; Indonesian Church; Pancasila; Exclusivism; Inclusivism; Pluralism; Diversity

© 2023 by author(s).

Licensee *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan*.

This article is licensed under the term of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International



Scan this QR code with your mobile devices to read online

Eksklusivisme Gereja Evangelikal di Indonesia dan Semangat Kemajemukan Pancasila: Mungkinkah Keduanya Bersatu?

Indra Kurniadi Tjandra,^{1*} Yusuf Deswanto,²

¹⁾ Gereja Kristen Indonesia Jemaat Kota Modern, Tangerang, Indonesia

²⁾ Persekutuan Mahasiswa Antar Universitas, Jember, Indonesia

^{*)} maskoki2004@gmail.com

Abstrak: Pancasila merupakan kompromi politik yang memungkinkan bangsa Indonesia tetap berjalan bersama-sama di dalam pelbagai keyakinan agama (Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, Protestan, Katolik, serta kepercayaan-kepercayaan lainnya kepada Tuhan yang Maha Esa). Di sisi lain, ajaran dan praktik gereja evangelikal di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan doktrin dasar keselamatan dan praksis penginjilan, sering dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Studi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa keyakinan fundamental gereja evangelikal tidak bertentangan dengan semangat kebhinekaan dalam Pancasila. Tesis dari kedua penulis adalah bahwa doktrin dan praksis dasar evangelikal sebetulnya tidak bertentangan dengan sifat inklusivisme dari Pancasila sebab sejarah pembentukan Pancasila diwarnai oleh kalangan Islam neo-modernis yang sesungguhnya sangat eksklusif secara teologis. Pendekatan yang dilakukan dalam studi ini adalah menggali akar sejarah gerakan evangelikal di dunia hingga Indonesia, yang kemudian dikomparasikan dengan sejarah lahirnya Pancasila, untuk menunjukkan koherensi antara ajaran dan praktik gereja-gereja evangelikal Indonesia terhadap nilai Pancasila.

Kata-kata kunci: Evangelikalisme; Gereja Indonesia; Pancasila; Eksklusivisme; Inklusivisme; Pluralisme; Kemajemukan

PENDAHULUAN

Gerakan evangelikal yang mewujud dalam gereja-gereja evangelikal di Indonesia, sering dikaitkan dengan stigma negatif gerakan kaum yang berpandangan sempit, kaku, serta fanatik dalam hubungannya dengan kemajemukan agama di tengah masyarakat dunia, juga di Indonesia. John Stott mengutip James Davison Hunter, yang mendeskripsikan kaum evangelikal sebagai “*right-wing zealots*,” “*religious nuts*,” “*a misanthropic cult*,” “*fanatics*,” “*demagogues*,” “*anti-intellectual and simplistic*.”¹ Secara historis, keterkaitan antara

gerakan evangelikal dan fundamentalisme di Amerika Serikat telah menyebabkan kesalahpahaman gereja-gereja evangelikal dengan “fundamentalisme agama-agama” di Indonesia.² James Barr dalam *Fundamentalisme*, menggambarkan keterkaitan evangelikalisme dan fundamentalisme dalam kerangka sudut pandang penafsiran Alkitab dan teologis.³ Dalam buku tersebut, sedikitnya Barr memberi kesan bahwa evangelikalisme

²Pemahaman ini tidak sepenuhnya benar, namun tak hindarkan karena kesamaan terminologi yang digunakan, serta semangat pemurnian ajaran kepada otoritas mutlak Kitab Suci yang mirip dengan fundamentalisme agama-agama di Indonesia.

³James Barr, *Fundamentalisme*, terj. Stephen Suleeman (Jakarta: Gunung Mulia, 1996), 1-11. Sebagai teolog Inggris, Barr sendiri melakukan studi kritis terhadap fundamentalisme dalam konteks perkembangan gereja di Inggris.

¹John Stott, *Evangelical Truth: A Personal Plea for Unity, Integrity and Faithfulness* (Cumbria: Langham Global Library, 2013), “Introduction,” ePub.

memiliki pandangan yang sedikit lebih moderat dari pada kaum fundamentalisme.⁴

Dalam perkembangan gereja-gereja evangelikal di Indonesia, harus diakui bahwa gerakan fundamentalisme juga mewarnai payung besar evangelikal, ditambah dengan berkembangnya Pentakostalisme dan Kharismatik. Beberapa aliran Pentakostalisme dan Kharismatik yang berada di payung gereja evangelikal, memiliki cara pandang dualistik antara dunia dan sorga, sehingga cenderung untuk eskapis atau apatis terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Harls Evan Siahaan menyebutkan, “[Pentakostalisme] lebih memperhatikan persoalan ‘rohani’ (relasi vertikal) dibandingkan menangani hal-hal yang bersifat sosial, budaya, bahkan politik (relasi horisontal). Umat lebih didorong bergiat dalam mengejar kesalehan, terlibat dalam pelayanan gerejawi, memiliki karunia-karunia, sehingga kurang memiliki kepekaan sosial yang berimbang.”⁵

Benarkah eksklusivisme evangelikal dalam ajaran tentang keselamatan bersebrangan dengan nilai-nilai Pancasila yang memiliki natur toleran? Apakah corak teologi dan gerakan gereja-gereja evangelikal di Indonesia turut menyuburkan fragmentasi antara agama-agama di Indonesia? Hal-hal apa saja yang dapat dikembangkan dalam “gerbong” gereja-gereja evangelikal di Indonesia dalam perannya untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dikembangkan untuk makalah ini adalah penelitian deskriptif melalui studi pustaka. Temuan-temuan data fenomenal-historis dari kajian literatur tentang gereja-gereja evangelikal di dunia dan di Indone-

sia akan diperbandingkan dengan temuan-temuan tentang catatan historis penyusunan Pancasila serta nilai-nilainya. Analisis dalam penelitian ini menitikberatkan pada interpretasi terhadap temuan-temuan literatur yang didapat. Tujuan dari penelitian ini, selain untuk memaparkan pembuktian hipotesa penulis bahwa aspek-aspek dalam teologi dan praksis gereja evangelikal memiliki koherensi konstruktif terhadap nilai dan implementasi Pancasila, adalah memberi sumbangsih bagi pengembangan peran gereja evangelikal untuk implementasi Pancasila secara nyata di tengah kemajemukan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Evangelikalisme Global

Evangelikalisme adalah satu gerakan kekristenan besar yang paling dinamis di dunia modern.⁶ Terminologi “evangelikalisme” berakar pada istilah dalam bahasa Yunani “*euangelion*” (kata benda, yang berarti “kabar baik”). Alasan penulis mempertahankan kata “evangelikal” atau “evangelikalisme” dalam penelitian ini adalah untuk membedakannya dengan terminologi Injil (*gospel*), dan kata sifat yang berkaitan dengan Injil dalam konteks studi Alkitab dan interpretasinya (injili). Istilah “evangelikal” sebenarnya sudah muncul sejak masa reformasi gereja Protestan, dimana Luther dan para penerusnya menyebut gereja hasil gerakan Reformasi dengan nama *Evangelische Kirche* (bahasa Jerman artinya: “Gereja Injili”).⁷ Gereja Roma Katholik menyebut buah dari Reformasi ini sebagai “gereja Protestan,” karena telah melakukan protes terhadap gereja. Namun Luther tidak setuju dengan istilah itu, dan lebih suka dengan istilah “*evangelical*,” yang ingin menekankan kemurnian berita In-

⁴Barr, *Fundamentalisme*, 6.

⁵Harls Evan Siahaan, “Karakteristik Pentakostalisme Menurut Kisah Para Rasul,” *Dinamis: Jurnal Penelitian Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no.1 (Oktober 2017), 14, <https://doi.org/10.30648/dun.v2i1.132>.

⁶Bdk. Bruce Hindmarsh, “What Is Evangelicalism?”, *Christianity Today*, 14 Maret 2018, <https://www.christianitytoday.com/ct/2018/march-web-only/what-is-evangelicalism.html>.

⁷Jan S. Arintonang, *Berbagai Aliran di dalam dan di Sekitar Gereja* (Jakarta: Gunung Mulia, 1995), 228.

jil di dalam Alkitab sebagai satu-satunya sumber ajaran dan dasar kehidupan gereja.⁸

Asal-usul evangelikalisme modern berakar pada gerakan pemurnian abad ketujuh belas seperti Pietisme, Puritanisme, dan tradisi “*holy living*” gereja Anglikan, yang membawa kebangunan rohani pertama di Eropa tengah dan Jerman, hingga ke wilayah Inggris dan sekitarnya. Pada paruh ketiga abad kedelapan belas, sejumlah orang mengalami pertobatan pribadi karena khotbah-khotbah kebangunan rohani oleh John dan Charles Wesley serta George Whitefield, dan ditambah pengaruh gerakan pietisme Jerman, yang membawa pembaharuan ini di Inggris. Kebangunan rohani yang dialami mereka membawa dorongan-dorongan baru untuk berkhotbah, melakukan perjalanan, menggerakkan dan mengkampanyekan *evangelical renewal* yang tersebar luas di kalangan Anglikan, Metodis, Moravia, Presbiterian, serta Kongregasionalis atau Baptis.⁹

Kebangunan rohani gereja-gereja lokal di Amerika dan Skotlandia-Irlandia memengaruhi kebangkitan gerakan evangelikal yang lebih luas. Para pengkhotbah evangelikal mendorong banyak orang mengalami pertobatan pribadi dalam waktu singkat. Jonathan Edwards mencatat fenomena tersebut dalam beberapa seri bukunya, yang dimulai dengan *Faithful Narrative of the Surprising Work of God* (1737).¹⁰ Analisisnya tentang fenomena umum kebangunan rohani membentuk sebuah paradigma tentang ciri kaum evangelikal pada kehidupan rohani, yang meluas ke wilayah Atlantik Utara. Sejak saat itu, evangelikalisme tidak hanya berurusan dengan pertobatan tetapi juga kebangunan rohani.¹¹

Sebagai gerakan rohani yang menyebarkan *true religion*, evangelikalisme bangkit dari ke-

merosotan denominasi-denominasi yang sudah mapan yang mulai dibawa pada arus modernisme. Di saat modernisme mendorong gereja yang *established* masuk pada isu-isu kebebasan beragama, cita-cita demokrasi, industri dan teknologi, namun kehidupan jemaat secara moral semakin merosot; kaum evangelikal menggerakkan pria dan wanita untuk hidup kudus dan menjadi “agen Allah”, yang terhubung dengan kelompok kecil yang kuat atau lembaga pelayanan yang lebih besar.

Evangelikalisme tidak menjadi sebuah gereja atau denominasi yang spesifik, walaupun banyak laki-laki dan perempuan mengidentifikasi diri dengan gerakan ini. Sebagai contoh, secara haluan teologis dua bersaudara Wesley adalah Arminian sejati, sedangkan Whitefield dan Edwards tokoh-tokoh Calvinis. Dari sisi denominasi gereja, Wesley dan Whitefield merupakan pengkhotbah keliling dari Church of England (Anglikan), sedangkan Edwards ialah seorang pendeta gereja Kongregasional di Amerika. Spiritualitas Wesley dipengaruhi oleh kaum Moravian (pietis), sedangkan Edwards mendapatkan pengaruh yang kuat dari kaum puritan.¹² Namun dalam perbedaan denominasi tersebut, kaum evangelikal mampu berbagi bersama dalam tujuan-tujuan tertentu, seperti gerakan misi besar di abad kesembilan belas, dan mereka juga semakin memperlihatkan identitas trans-nasional dan trans-denominasi mereka dalam lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi pendamping gereja (*parachurch*) yang baru.

Awal abad kedua puluh biasa dikenal sebagai “era fundamentalisme,” dimana gerakan fundamentalisme Amerika berkembang dan diiringi “era kebangkitan Pentakosta-Kharismatik.” Selama abad kedua puluh, jumlah besar kaum evangelikal bergeser dari Eropa

⁸Aritonang, *Berbagai Aliran*, 228.

⁹Stephen V. Monsma, “What is an Evangelical? And Does It Matter?”, *Christian Scholar Review* XLVI, no. 4 (Summer 2017), <https://christianscholars.com/issues/summer-2017/>.

¹⁰Hindmarsh, “What Is Evangelicalism.”

¹¹Hindmarsh, “What Is Evangelicalism.”

¹²Chandra Wim, “The Chronicles of Evangelicalism: Sebuah Pengantar Historis Terhadap Gerakan Evangelikal,” *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 12, no. 2 (Oktober 2011), 199, <https://doi.org/10.36421/veritas.v12i2.249>.

dan Amerika Utara ke Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Pada tahun 1942 dibentuklah *National Association of Evangelicals* (NAE), yang menandai kehadiran gerakan evangelikal yang makin meluas. Gerakan evangelikal di Amerika berkembang pesat melalui pelayanan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga pelayanan evangelikal. Tokoh gerakan evangelikal yang terkenal di Amerika adalah Billy Graham, seorang pengkhotbah *revivalist* terbesar abad ke dua puluh. Jan Aritonang menulis: “Billy Graham telah menjadi simbol ataupun maskot gerakan Evangelikal bahkan hingga sekarang.”¹³

Pada tahun 1974 Kongres Lausanne pertama, yang diprakarsai oleh Billy Graham telah berhasil mengumpulkan 2.700 delegasi dari 150 negara. Kongres itu menyatukan seluruh tokoh kaum evangelikal untuk bersaksi di tengah globalisasi sekaligus keragaman ras dari gerakan evangelikal. Mereka merayakan apa yang mereka sebut “*many-colored wisdom of God*.”¹⁴ Kongres ini juga mempercepat pergeseran dari cara pandang “fundamentalisme lama” menuju titik yang lebih inklusif. Ini terbukti dalam kemitraan yang dijalin oleh Billy Graham dengan kelompok-kelompok Kharismatik, serta keterlibatan bersama dalam gerakan global. Pertumbuhan dan globalisasi evangelikalisme telah menguji koherensi gerakan, tidak hanya dalam hal kaitan antara pemahaman dan praktik Kharismatik dan non-Kharismatik, tetapi juga dalam kaitannya dengan gerakan *post-evangelical* yang makin sadar akan tanggung jawab kekristenan di tengah dunia.¹⁵

Gerakan Evangelikal di Indonesia

Beberapa denominasi dan sinode gereja arus utama di Indonesia, misalnya GMIM, GMIT, GMIH, GMIST, GMIBM, dan GKI di Tanah Papua, menggunakan istilah “Injili” (Evangelical). Bahkan ada satu gereja arus utama

menggunakan istilah “Evangelis” (GKE). Hal ini berkaitan dengan sejarah Protestantisme yang berhubungan dengan istilah “*evangelisch*” di Gereja Jerman, yaitu *Evangelische Kirche in Deutschland*.¹⁶ Aritonang berargumen bahwa anggapan gerakan evangelikalisme di Indonesia dibawa oleh lembaga misi dari Eropa dan Amerika di abad kesembilan belas yang tergabung dalam *Evangelical Alliance* (didirikan di Inggris tahun 1846) menjadi tidak tepat karena gereja-gereja arus utama di atas tidak memiliki karakteristik evangelikal dalam tekanan ajaran dan gerakan.¹⁷

Aritonang kemudian menjelaskan bahwa denominasi Baptis merupakan misi evangelikal pertama yang datang ke Indonesia. Dia menjelaskan bahwa para pemimpin gereja Baptis di Amerika adalah para pemimpin gerakan evangelikal, misalnya Billy Graham. Baptist Missionary Society (BMS) dari Inggris bahkan telah datang dan bekerja di Indonesia untuk pertama kalinya pada era Inggris (1811–1816/1825), lebih awal dari perkumpulan misionaris kontinental yang berasal dari latar belakang Lutheran dan Reformed. Seorang putra William Carey, Jabez Carey, bahkan sempat bekerja di Maluku pada tahun 1814–1818.¹⁸ Karena masuknya Belanda ke Indonesia, para pemimpin gerakan Baptis ini harus keluar Indonesia dan belum sempat mendirikan jemaat di Indonesia. Pada tahun 1950 sejumlah misionaris dari Foreign Mission Board dari Southern Baptist Convention harus meninggalkan China. Beberapa dari mereka datang ke Indonesia dan memulai misi Baptis di sana (1951). Dimulailah perkembangan gereja dan lembaga Baptis di Indonesia sejak saat itu.¹⁹

¹⁶Jan S. Aritonang dan Karel Steenbrink, “The Spectacular Growth of the Third Stream: The Evangelicals and Pentecostals,” dalam *A History of Christianity in Indonesia*, ed. Jan S. Aritonang dan Karel Steenbrink (Leiden: Brill, 2008), 867, <https://doi.org/10.1163/ej.9789004170261.i-1004.203>.

¹⁷Aritonang dan Steenbrink, “Spectacular Growth,” 869.

¹⁸Aritonang dan Steenbrink, “Spectacular Growth,” 869.

¹⁹Aritonang dan Steenbrink, “Spectacular Growth,” 869.

¹³Aritonang, *Berbagai Aliran*, 242.

¹⁴Hindmarsh, “What Is Evangelicalism.”

¹⁵Hindmarsh, “What Is Evangelicalism.”

Sejarawan gereja juga mencatat Christian and Missionary Alliance (CAMA, terkadang disingkat CMA), yang diprakarsai oleh A. B. Simpson di USA pada tahun 1880-an, sebagai pelopor misi Evangelikal dan gereja-gereja di Indonesia, terutama melalui karya misionarisnya yang terkenal, R. A. Jaffray, dari tahun 1928. CAMA memiliki peran mendirikan beberapa gereja yang berkumpul di bawah apa yang disebut “aliansi” atau rumpun Kemah Injil, dan masuk dalam payung Persekutuan Injili Indonesia (PII). Saat ini rumpun ini telah berkembang menjadi beberapa gereja (GKII, KIBAIID, GKKA, Gepekris, GPMII, dll), tersebar di hampir semua provinsi, dengan anggota lebih dari 500.000. Kelompok ini juga merintis Sekolah Tinggi Teologi “Jaffray” (didirikan tahun 1930 di Makassar, Sulawesi Selatan), yang berkembang juga menjadi Institut Filsafat, Teologi dan Kepemimpinan Jaffray (IFTK) di Jakarta.²⁰

Overseas Missionary Fellowship (OMF) menjadi lembaga misi evangelikal berikutnya yang hadir di Indonesia pada tahun 1950. Beberapa tahun kemudian berdiri Institut Injili Indonesia (I3; saat ini STT I3) pada tahun 1959, disusul dengan Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil di Indonesia (YPPII) pada tahun 1961. Lahirnya Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT) tahun 1952 yang dirintis oleh Pdt. Dr. Andrew Gih, juga memperkaya corak evangelikal di Indonesia. Sekolah teologi yang mulanya dinamakan Madrasah Alkitab Asia Tenggara ini didirikan di Bandung, lalu pindah ke Malang pada tahun 1954. Pada tahun 1981, ia kemudian berubah nama menjadi Seminari Alkitab Asia Tenggara.²¹

Kehadiran organisasi-organisasi evangelikal tersebut berdampak pada munculnya banyak gereja baru di Indonesia. Sebab organisasi-

organisasi tersebut sangat giat dalam mem-beritakan Injil dan membuka gereja-gereja baru di seluruh pelosok Indonesia.

Organisasi Evangelikal yang lain yang dibentuk oleh gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen Evangelikal adalah Persekutuan Injili Indonesia (PII) pada tahun 1971. PII adalah persekutuan dan tempat kerjasama orang-orang, badan-badan dan gereja-gereja yang berpaham evangelikal, yang kemudian berganti nama menjadi Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII) pada tahun 2006.²²

Sebagian besar gereja evangelikal Indonesia bergabung dengan PII, sedangkan gereja-gereja pentakostal sebagian besar adalah anggota Persekutuan Gereja-gereja Pantekosta di Indonesia (PGPI). PGPI sebelumnya bernama Dewan Pentakosta Indonesia (DPI) yang didirikan pada 1979. Ada juga beberapa gereja pentakostal bergabung di PII, karena mereka juga mengklaim atau mengakui diri mereka sebagai “evangelis.” Beberapa lagi malah bergabung dengan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), yang bercorak lebih ekumenis.²³

Tidak semua gereja evangelikal bergabung dengan PII (hingga tahun 2001, ada 84 gereja dan lembaga misi yang menjadi anggota penuh). Salah satunya adalah Gereja Reformed Injili Indonesia (GRII). Di sisi lain, beberapa anggotanya juga tergabung dalam PGI, misalnya Gereja Kristus Tuhan (GKT; didirikan pada tahun 1968 di Lawang, Jawa Timur), Gereja Kristen Anugerah (GKA; didirikan di Jakarta, 1968), Gereja Kristen Kalam Kudus (GKKK; didirikan di Jakarta, 1973), Gereja Kristen Injili Indonesia (GKII; didirikan di Bengkulu, 1967), Gereja Kristen Injili di Indonesia (Gekisia; didirikan di Bengkulu, 1985, sebagai pemisahan dari GKII), Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI; didirikan di Jakarta, 1988), Gereja Kristen Per-

²⁰Aritonang dan Steenbrink, “Spectacular Growth,” 869.

²¹Enggar Objantoro, “Sejarah dan Pemikiran Kaum Injili di Tengah-tengah Perubahan dan Tantangan Zaman,” *Evangelikal: Jurnal Teologi dan Pembinaan Warga Jemaat* 1, no. 2 (Juli 2017): 133, <https://doi.org/10.46445/ejt.i.v1i2.77>.

²²Objantoro, “Sejarah dan Pemikiran,” 133.

²³Aritonang dan Steenbrink, “Spectacular Growth,” 868.

janjian Baru (GKPB; didirikan di Surabaya, 1989), dan Gereja Keesaan Injili Indonesia (Gekindo; didirikan di Jakarta, 1993).²⁴

Percabangan gereja-gereja evangelikal dalam tradisi teologis dan kelembagaan gereja, serta pilihan keterlibatan dalam organisasi antar-gereja ini menunjukkan variasi yang sangat beragam dari gereja-gereja evangelikal di Indonesia. Maka bisa dipahami bahwa keterlibatan gereja-gereja evangelikal di Indonesia dalam interaksi dengan elemen-elemen masyarakat Indonesia juga beragam dalam perkembangannya. Secara umum dan formal, gereja-gereja ini menerima Pancasila sebagai falsafah bangsa. Namun pemahaman dan interaksi gereja-gereja evangelikal dengan Pancasila sangat beragam perkembangannya.

Eksklusivisme Gereja Evangelikal yang Inklusif dalam Negara Pancasila

Memetakan perjumpaan gereja-gereja evangelikal Indonesia dalam konstelasi sosial-politik dan kebangsaan Pancasila tidak berhenti pada pembangunan peran gereja evangelikal Indonesia dalam hubungannya dengan negara Pancasila. Perjumpaan tersebut juga menempatkan gereja evangelikal Indonesia dalam konteks kemajemukan (pluralitas atau diversitas) agama-agama di Indonesia. Pada takaran konseptual, perjumpaan ideologi Pancasila dalam teologi dan praksis gereja evangelikal Indonesia bukan sesederhana menerima konsep Pancasila secara formal dalam kelembagaan gereja, tetapi harus mencapai dialektika antara ideologi Pancasila dengan teologi-praksis gereja evangelikal itu sendiri. Pada penelitian ini penulis akan lebih berfokus pada takaran konseptual dalam memetakan perjumpaan Pancasila sebagai ideologi dengan teologi dasar gereja evangelikal, dengan tetap melihat potensi implementasi perjumpaan tersebut.

Mendefinisikan teologi-praksis gereja evangelikal Indonesia tentu perlu merujuk pada gerakan evangelikal secara global.²⁵ Stott mengutip identifikasi enam karakteristik evangelikalisme oleh J. I. Packer sebagai berikut: “[1] *the supremacy of Holy Scripture*, [2] *The majesty of Jesus Christ*, [3] *The lordship of the Holy Spirit*, [4] *The necessity of conversion*, [5] *The priority of evangelism*, [6] *The importance of fellowship*.”²⁶ Karakteristik evangelikalisme lebih kontemporer dituliskan oleh sejarawan Inggris, David Bebbington: keyakinan bahwa hidup perlu terus diubah (*conversionism*), perhatian khusus pada otoritas Alkitab sebagai firman Allah (*biblicism*), penekanan pada pengorbanan Kristus di kayu salib (*crucicentrism*), tindakan-tindakan nyata sebagai ekspresi Injil (*activism*). Bebbington kemudian menyimpulkan “bersama-sama ini membentuk segi empat prioritas yang merupakan dasar dari evangelikalisme.”²⁷ Nampaknya hampir semua kelompok dalam payung gerakan evangelikal, termasuk gereja-gereja evangelikal di Indonesia, menerima empat ciri Bebbington yang kemudian dikenal dengan sebutan “*Bebbington Quadrilateral*” ini.

Secara umum, sikap gereja (kekristenan) terhadap keberadaan agama-agama di dunia terpecah dalam tiga pandangan: pluralisme, inklusivisme, dan partikularisme atau eksklusivisme.²⁸ Mengacu pada penjelasan ringkas Ferry Mamahit, ketiga pandangan ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

Pluralis adalah sikap yang percaya bahwa agama-agama dunia yang utama menyediakan akses keselamatan yang indepen-

²⁵Hendra Winarjo, “Menuju Satu Tubuh dengan Berbagai Anggota: Sikap Kaum Injili untuk Memediasi Konflik yang Berpotensi Muncul Akibat Keragaman Denominasi Gereja di Indonesia,” *Jurnal Amanat Agung* 16, no. 2 (2020): 269-272, <https://doi.org/10.47754/jaa.v16i2.495>.

²⁶Stott, *Evangelical Truth*, “Introduction,” ePub.

²⁷Stott, *Evangelical Truth*, “Introduction,” ePub.

²⁸Dennis L. Okholm, Timothy R. Phillips, ed., *Four Views on Salvation in A Pluralistic World* (Grand Rapids: Zondervan, 1996), 17-26. Buku ini menggambarkan diskusi ketiga pandangan ini dari sudut pandang para teologinya.

²⁴Aritonang dan Steenbrink, “Spectacular Growth,” 868.

den terhadap Realitas Ilahi; kedua, inklusif adalah sikap yang memandang bahwa agama-agama memiliki aspek yang positif dan negatif, aksesibilitas anugerah keselamatan Allah dipandang koheren dengan finalitas Yesus Kristus; dan ketiga, sikap eksklusif atau partikularis adalah sikap yang meyakini bahwa keselamatan hanya dapat diakses dalam skema sejarah keselamatan, di mana wahyu Allah yang khusus (di dalam Yesus Kristus) adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan.²⁹

Para sarjana melihat evangelikalisme secara umum memiliki pandangan eksklusif dalam hubungannya dengan pluralitas agama-agama di dunia. Namun sebagaimana corak pandangan gereja-gereja evangelikal yang beragam dan dinamis, memasukkan gereja evangelikal dalam kotak “eksklusivisme” agaknya terlalu menyederhakan ciri dari evangelikalisme. Veli-Matti Kärkkäinen memberikan studi yang lebih mendalam tentang perbedaan pandangan teolog evangelikal menjadi tiga kategori: *christocentism*, *theocentrism*, dan *ecclesiocentrism*.³⁰ Beberapa sarjana evangelikal terbukti juga memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat eksklusivisme gerakan evangelikal di tengah agama-agama di dunia.

Secara konseptual gerakan evangelikal harus dibedakan dengan fundamentalisme, terutama dalam hubungannya dengan agama-agama di dunia. Stott menolak penyeragaman gerakan evangelikal dengan fundamentalisme yang tertutup dan eksklusif terhadap agama-agama di luar kekristenan: “*Many evangelicals, however, although critical of the liberal agenda and frequently unprincipled methodo-*

logy of the World Council of Churches, have tried to be discerning, affirming in ecumenism what seems to them to have biblical support, while claiming the freedom to reject what has not.”³¹ Dalam kaitannya dengan kondisi dunia, Stott juga menegaskan perbedaan gereja evangelikal dengan cara pandang fundamentalisme yang eskapis. Stott meyakini bahwa gereja evangelikal secara umum memegang perintah alkitabiah untuk tidak berkompromi dengan dunia ini, sekaligus merespons panggilan Yesus untuk masuk ke dalam dunia sebagai garam dan terang; mencegah pembusukan dan menerangi kegelapan dunia.³²

Penulis mengacu pada dua konsensus gerakan evangelikal sedunia yang terkini, yaitu The Third Lausanne Congress on World Evangelization (Cape Town, Afrika Selatan, 16-25 October 2010). Kongres Lausanne ketiga ini menghasilkan sebuah dokumen berjudul “The Cape Town Commitment: A Confession of Faith and A Call to Action.”³³ Di samping itu, penulis juga mengacu pada dokumen “Christian Witness in a Multi-Religious World: Recommendations for Conduct.”³⁴ Dokumen ini ditandatangani oleh World Evangelical Alliance (Aliansi Gereja Evangelikal sedunia) bersama Pontifical Council for Interreligious Dialogue (dari Gereja Katolik Roma) dan World Council of Churches (Dewan Gereja-Gereja Dunia). Dari dua dokumen penting ini, nampak bahwa gereja-gereja evangelikal memiliki *common-ground* yang sama dengan gereja-gereja yang dikenal lebih inklusif dalam implementasi teologis-prak-

²⁹Ferry Y. Mamahit, “Sikap Ekumenikal dan Evangelikal terhadap Agama-agama Lain: Sebuah Analisis Perbandingan Historis-Teologis,” *Dunamis: Jurnal Penelitian Teologi dan Pendidikan Kristiani* 5, no. 1 (Oktober 2020): 72, <https://doi.org/10.30648/dun.v5i1.329>.

³⁰Veli-Matti Kärkkäinen, *An Introduction to the Theology of Religions: Biblical, Historical and Contemporary Perspectives* (Downers Grove: InterVarsity, 2014), 261-342.

³¹Stott, *Evangelical Truth*, “Introduction,” ePub.

³²Stott, *Evangelical Truth*, “Introduction,” ePub.

³³“The Cape Town Commitment,” *Lausanne Movement*, diakses 20 Maret 2022, <https://lausanne.org/content/ctc/ctc-ommitment>. Selanjutnya disingkat CTC dan referensi dalam kurung di teks utama.

³⁴“Christian Witness in a Multi-Religious World: Recommendations for Conduct,” *World Council of Churches*, 2011), diakses 20 Maret 2022, <https://www.oikoumene.org/resources/documents/christian-witness-in-a-multi-religious-world>. Selanjutnya disingkat CWMRW dan referensi dalam kurung di teks utama.

tisnya di tengah konteks pluralitas agama-agama.

Bagian kedua (IIA.2) dari CTC dengan gamblang menyatakan adanya satu kesadaran bahwa pluralitas budaya dan agama adalah realita dan fakta tak terelakkan, khususnya bagi orang-orang Kristen di Asia. Karena itu, “para pemimpin gereja evangelikal berkomitmen untuk memperlengkapi semua orang percaya dengan keberanian dan perlengkapan untuk mengaitkan kebenaran dengan relevansi profetik dalam setiap percakapan pribadi, serta masuk dan berinteraksi dengan aspek-aspek budaya di mana kita hidup.” Bagian berikutnya (IIC.1) melanjutkan:

We strive not only to see them as neighbours, but to obey Christ’s teaching by being neighbours to them. We are called to be gentle, but not naive; to be discerning and not gullible; to be alert to whatever threats we may face, but not ruled by fear.

Bagian tersebut juga menegaskan bahwa gereja-gereja evangelikal dipanggil untuk berkomitmen pada pemberitaan Injil, namun harus menolak segala bentuk kesaksian yang bersifat memaksa, tidak etis, manipulatif, atau tidak sopan. Gereja-gereja evangelikal juga mengakui kegagalannya untuk menjalin persahabatan dengan orang-orang yang berlatar belakang Muslim, Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Karena itu, semua pemimpin dan jemaat dipanggil untuk mengambil inisiatif dalam menyatakan kasih, niat baik, dan keramahan tulus kepada mereka, dengan semangat Kristus.

Dokumen CWMRW memberikan dua belas prinsip penting bagi kesaksian Kristen di tengah dunia plural. Penulis menggaris bawahi dua prinsip yang menunjukkan sikap gereja evangelikal yang terbuka dengan keberadaan pluralitas agama-agama. Prinsip ketujuh tentang “*freedom of religion and belief*,” menegaskan bahwa “kebebasan beragama termasuk hak untuk secara terbuka mengakui, me-

ngamalkan, menyebarkan dan mengubah agama seseorang mengalir dari martabat pribadi manusia yang didasarkan pada penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah (bdk. Kej. 1:26).” Prinsip keduabelas yaitu mengenai “*building interreligious relationships*” pula mendorong “orang Kristen harus terus membangun hubungan saling menghormati dan percaya dengan orang-orang dari agama yang berbeda, untuk memfasilitasi pengertian yang lebih dalam satu sama lain, rekonsiliasi dan kerjasama untuk kebaikan bersama.”

Dari kedua dokumen tersebut, kita seharusnya dapat mengambil kesimpulan bahwa gereja-gereja evangelikal secara global telah berupaya dan terus menjadi lebih “inklusif” dalam semangatnya untuk menyatakan kasih Kristus yang tulus dan tanpa manipulasi, dengan cara membangun relasi dan persahabatan secara intensional dan antaragama. Kesaksian Injil yang menjadi panggilan Allah bagi gereja-gereja evangelikal harus dibangun dalam ruang-ruang perjumpaan dan dialog yang penuh rasa hormat, kasih, dan persahabatan. Sikap demikian tentunya diharapkan untuk pula diadopsi oleh gereja-gereja evangelikal di Indonesia.

Memahami Indonesia: Nilai dan Makna Pancasila

Menurut Eka Darmaputera, untuk memahami Indonesia pada masa kini kita harus melihat sejarah masa lampau nusantara: “Bukan karena yang lampau itu secara tuntas dapat menjelaskan yang sekarang, tetapi yang hendak dikatakan adalah bahwa tanpa pemahaman yang memadai tentang masa lampau, kita tak akan dapat memahami Indonesia masa kini.”³⁵ Terkait dengan Indonesia di masa lampau, Yudi Latif menegaskan, “Indonesia sejak lama menjadi titik temu penjelajahan bahari yang membawa pelbagai arus peradaban. Maka, jadilah Nusantara sebagai taman

³⁵Eka Darmaputera, *Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya* (Jakarta: Gunung Mulia, 1997), 44.

sari peradaban dunia.”³⁶ Jadi, sejak awal memang Indonesia sudah menjadi tempat tinggal dari banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Mengenai semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, Darmaputera mengatakan, “Semboyan nasional ini dengan tepatnya menjelaskan realitas yang paling dalam dari Indonesia.”³⁷ *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan cerminan kehidupan majemuk yang mampu berjalan secara beriringan meskipun masing-masing pihak berbeda satu sama lain. Pernyataan Darmaputera ini senada dengan penjelasan Latif: “Monumen dari usaha intelektual untuk mencari sintesis dari keragaman anasir keindonesiaan itu adalah ‘sumpah pemuda’ 28 Oktober 1928, dengan visinya yang mempersatukan segala keragaman itu ke dalam kesatuan tanah air dan bangsa dan dengan menjunjung bahasa persatuan.”³⁸ Fakta sejarah ini menjelaskan bahwa persatuan Indonesia sudah terjalin jauh (1928) sebelum proklamasi kemerdekaan (1945).

Pancasila sebagai Payung Kemajemukan Indonesia

Darmaputera berganggapan bahwa Pancasila adalah sebuah payung kesepakatan yang harus dipegang oleh masing-masing pihak di bumi Indonesia bila ingin kehidupan di Indonesia terus menerus berjalan secara harmonis. Di dalam sejarahnya, Pancasila diusulkan dan kemudian diterima sebagai kompromi antara dua pendapat, pendapat yang menghendaki adanya negara agama dan pendapat lain yang menghendaki adanya negara sekuler.³⁹

³⁶Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas, dan Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2021), 3.

³⁷Darmaputera, *Pancasila Identitas*, 13.

³⁸Latif, *Negara Paripurna*, 7.

³⁹Darmaputera menjelaskan secara rinci bahwa sila pertama merupakan sebuah kompromi politik antara Soekarno dan kalangan Islam sehingga pihak Islam bisa menerima Pancasila yang menjadi identitas kemajemukan Indonesia. Ia tidak merujuk kepada Allah atau Tuhan agama tertentu melainkan kepada satu konsep atau prinsip yang umum diterima oleh semua agama. Darmaputera, *Pancasila Identitas*, 109.

Di bagian lain, Darmaputera menjelaskan, “Pancasila telah berhasil menjawab persoalan pokok yang dihadapi masyarakat Indonesia. Ia telah memberikan suatu identitas yang mampu menjawab tantangan-tantangan kontemporer, dan sekaligus bermuara pada warisan tradisi budaya Indonesia masa lalu.”⁴⁰ Ini berarti Pancasila mampu melahirkan suatu “aturan main” yang dapat mencegah potensi-potensi perpecahan menjadi kenyataan. Melalui pendekatannya yang bersifat non diskriminatif, Pancasila memberikan suatu kerangka bagi semua kelompok masyarakat untuk dapat hidup, bekerja bersama untuk membangun suatu masa depan bersama, di mana masing-masing bertolak dari kepercayaan dan keyakinan.

Penulis melihat bahwa apa yang Darmaputera sampaikan sesungguhnya merupakan penjelasan dari semangat Pancasila yang diajarkan Ir. Soekarno. Soekarno yang pernah mengatakan:

Galilah apa yang hendak engkau jawabkan itu dari bumi Indonesia sendiri. Maka malam itu aku menggali, menggali di dalam ingatanmu, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada Negara Indonesia Merdeka yang akan datang.⁴¹

Kalimat pamungkas dari Soekarno berikut menegaskan nilai-nilai Pancasila telah ada sebagai kepribadian bangsa Indonesia sebelum “wujud” dari Pancasila itu lahir:

Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh sudah saya sering katakan, bahwa saya bukan pencipta Panca Sila. Saya sekedar penggali Panca Sila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang

⁴⁰Darmaputera, *Pancasila Identitas*, 147.

⁴¹Latif, *Negara Paripurna*, 15.

kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggalan daripada Panca Sila ini, saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya ... Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wataala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wataala.⁴²

Kesimpulannya, Pancasila adalah sebuah ideologi yang beruratakar dan mendarahdaging pada masyarakat Indonesia. Pancasila inheren di dalam Indonesia. Soekarno bahkan dengan tegas menolak disebut sebagai perancang ideologi bangsa. Ia hanyalah seorang anak bangsa yang melihat apa yang sudah ada di Indonesia. Soekarno mengartikulasikan budaya Indonesia dengan baik dengan sebutan Pancasila. Pancasila sejatinya merupakan intisari ideologi yang sudah ada benih-benihnya jauh sebelum bangsa ini memerdekakan diri dan membentuk identitasnya. Akibatnya, tidak sulit bagi bangsa ini untuk berjalan bersama bila seluruh rakyatnya menjawai Pancasila.

Sejarah Terbentuknya Pancasila

Di dalam sejarah pembentukan Pancasila, Benyamin Intan menguraikan realitas pertarungan antara Islam konservatif yang dikenal sebagai golongan Islam dan Islam moderat yang dikenal sebagai golongan kebangsaan.⁴³ Hal ini dibenarkan oleh Sarjana Pancasila lainnya, yakni Yudi Latif, meskipun Latif nampak sedikit berbeda di dalam penjelasannya.⁴⁴ Kedua golongan ini ingin memperjuangkan ideologinya masing-masing di ranah publik. Keberatan golongan Islam adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan ber-

bangsa akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang sekuler bukan bangsa religius. Sementara itu golongan kebangsaan yakin bahwa menerapkan syari'at Islam di Indonesia akan berdampak negatif terhadap bangsa yang majemuk. Oleh karena itu, bagi golongan kebangsaan, Pancasila menjadi harga mati yang harus dijunjung tinggi.

Latif menjelaskan bahwa rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bukti kompromi antara golongan Islam dan Kebangsaan.⁴⁵ Latif berpendapat bahwa titik temu antara kedua mazhab terdapat di dalam alinea ketiga UUD 45: "Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas..."⁴⁶ Kalimat barusan mencakup dua ideologi antara golongan Islam yang menekankan rahmat Allah dan golongan kebangsaan yang menginginkan kehidupan yang bebas.

Latif menambahkan bahwa final kompromi antara kedua golongan terdapat di dalam alinea terakhir pembukaan UUD 45.⁴⁷ Soekarno merubah susunan Pancasila pada 1 Juni, di mana prinsip ketuhanan dipindah dari sila kelima ke sila pertama, ditambah dengan anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya."⁴⁸ Mohammad Hatta memberikan komentar bahwa perubahan ini semakin memperkokoh bahwa Indonesia memiliki dasar moralitas di dalam agama.⁴⁹ Dengan kata lain, moralitas Indonesia adalah moralitas yang religius. Ada sebuah dasar atau alasan mengapa perlu menerapkan moralitas. Soekarno mengusulkan lima prinsip dasar yang bisa menjembatani antara kaum agamis muslim dan sekular nasionalis. Lima prinsip dasar ini adalah Pancasila dengan urutan: 1)

⁴²Latif, *Negara Paripurna*, 22.

⁴³Benyamin Fleming Intan. *Public Religion and Pancasila Based State of Indonesia An Ethical and Sociological Analysis*, (New York: Peter Lang, 2006), 38.

⁴⁴Latif, *Negara Paripurna*, 8.

⁴⁵Latif, *Negara Paripurna*, 25.

⁴⁶Latif, *Negara Paripurna*, 25.

⁴⁷Latif, *Negara Paripurna*, 26.

⁴⁸Latif, *Negara Paripurna*, 26.

⁴⁹Latif, *Negara Paripurna*, 27.

nasionalisme; 2) internasionalisme-perike-manusiaan; 3) mufakat atau demokrasi; 4) kesejahteraan sosial (keadilan); 5) ketuhanan.⁵⁰ Dengan menggunakan lima prinsip ini, maka Soekarno sejatinya sedang mengompromikan antara negara Islam dan negara sekuler. Pancasila mengandung empat prinsip sekuler sekaligus satu prinsip ketuhanan.

Soekarno menyebut kelima prinsip tersebut sebagai Pancasila. Arti dari Pancasila adalah keberadaan lima dasar (sila) yang menjadi fondasi didirikannya negara Indonesia.⁵¹ Soekarno mengakui bahwa lima unsur ini yang mendarah daging dalam masyarakat Indonesia.⁵² Di samping itu Soekarno menjelaskan bahwa angka lima merupakan angka keramat bagi antropologi Indonesia; rukun Islam berjumlah lima, jari jemari manusia berjumlah lima, manusia memiliki pancaindra, Indonesia memiliki narasai pandawa lima.⁵³

Beberapa orang dari golongan Islam mengatakan bahwa penggunaan Pancasila harus tetap menggunakan frasa “menerapkan syariat Islam bagi orang yang menganutnya.” Namun pandangan ini ditentang oleh golongan kebangsaan yang memandang penambahan frasa tersebut akan mengancam umat beragama lain. Penentangan ini bukan hanya dari kalangan muslim kebangsaan tetapi juga dari kalangan Kristen. Latuharhary seorang tokoh Kristen juga menolak keras penambahan frasa tersebut. Ia mengatakan:

Akibatnya akan sangat besar sekali, umpamanya terhadap agama lain. Maka dari itu, saya harap supaya dalam hukum dasar, meskipun ini berlaku buat sementara waktu, dalam hal ini tidak boleh diadakan benih-benih atau kemungkinan yang

dapat diartikan dalam rupa-rupa macam. Saya usulkan supaya di dalam hukum dasar diadakan pasal 1 yang terang supaya tidak ada kemungkinan apapun juga yang dapat membawa perasaan tidak senang pada golongan yang bersangkutan.⁵⁴

Intan berkata pula: “[W]e may say that from the beginning of the pre-independence period of Indonesia, religion, especially Islam and Christianity fully participated and had major contributions to the formation of Indonesian nationalism.”⁵⁵ Intan ingin menegaskan bahwa hadirnya bangsa yang bermoral tidak bisa dilepaskan dari kiprah agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Intan menyampaikan analisisnya sebagai berikut: “It was due to Muslim’s contribution that the principle of Lordship (ketuhanan) was placed first within the order of the five principle of Pancasila. This ordering asserted that Indonesia should be a ‘religious’ state in the sense that it should be based on religious beliefs.”⁵⁶ Senada dengan Intan, Latif menegaskan: “Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang memisahkan agama dan negara dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas.”⁵⁷

Latif menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) memilih Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan pada saat yang sama PPKI menyetujui naskah Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD 1945 kecuali tujuh kata di belakang sila ketuhanan serta menggantinya dengan “Yang Maha Esa.”⁵⁸ Di samping itu, sidang PPKI menghasilkan keputusan penting lain, yakni perubahan istilah “Allah” menjadi “Tuhan” dalam frasa “Atas berkat rahmat Allah yang mahakuasa” di dalam pembukaan UUD

⁵⁰Latif, *Negara Paripurna*, 40. Susunan ini kemudian berubah dengan meletakkan ketuhanan sebagai sila pertama dalam rapat 22 Juni 1945 oleh Komite Sembilan yang mengesahkan piagam Jakarta. Namun perubahan ini disertai dengan imbuhan “melakukan syariah bagi para pemeluknya.”

⁵¹Latif, *Negara Paripurna*, 18.

⁵²Latif, *Negara Paripurna*, 18.

⁵³Latif, *Negara Paripurna*, 18.

⁵⁴Latif, *Negara Paripurna*, 28.

⁵⁵Intan, *Public Religion*, 43.

⁵⁶Intan, *Public Religion*, 43.

⁵⁷Latif, *Negara Paripurna*, 47.

⁵⁸Latif, *Negara Paripurna*, 38.

1945.⁵⁹ Wakil dari Sunda Kecil (Bali Nusa Tenggara), I Goesti Ketoet Poedja mengusulkan perubahan tersebut karena istilah “Allah” dirasa dekat dengan agama-agama Abrahamik (Kristen, Islam, Yahudi) sehingga dirasakan kurang inklusif untuk Indonesia.⁶⁰

Berdasarkan uraian Intan dan Latif di atas, kita melihat betapa signifikan peran umat beragama di Indonesia. Para pendiri bangsa sudah memikirkan dengan seksama sebuah payung hukum yang inklusif untuk menaungi berbagai keyakinan sehingga masyarakat dengan berbagai latar belakang dapat hidup bersama di Indonesia dengan harmonis. Pertanyaan lebih lanjut yang perlu digali adalah bagaimanakah sejarah memandang isu proselitisasi agama atau kerap disebut sebagai penginjilan. Untuk menjawab pertanyaan ini penulis akan mengangkat tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang kerap disebut sebagai Neo-Modernis.

Pandangan Tokoh Muslim Neo Modernis Terhadap Penginjilan

Tokoh-tokoh muslim Indonesia yang berperan dalam mewujudkan Islam yang nasionalis disebut sebagai neo-modernisme. Mereka terdiri dari Nurcholis Madjid, Wahib, Effendi, Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Intan berkata, “*In brief, neo modernism movements represent a genuine attempt to combine progressive, liberal convictions with strong religious faith.*”⁶¹ Neo-modernisme adalah kombinasi antara pemahaman sekuler modern dan tradisional. Ia tidak mengingkari iman tetapi merangkul modernitas. Gus Dur menjelaskan neo-modernisme sebagai berikut:

Pribumisasi Islam is neither “Jawanisasi” (Javanization) nor syncretization since it only consider local necessities in formulating religious laws without changing the

*laws themselves. It is also not an attempt to put aside [religious] norms for the sake of culture, but to make sure that those norms accommodate the necessities of culture by using the opportunity provided by variations in understanding the [religious] text...*⁶²

Lalu bagaimana pandangan para tokoh ini mengenai penginjilan? Para tokoh neo-modernis beranggapan bahwa penyiaran agama merupakan hal yang lumrah. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap berada di dalam agama kita atau sebaliknya. Kebebasan beragama adalah hak asasi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Pemerintah tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Intan berkata “*The right to religious freedom therefore is absolute, sacred, and unconditional. This right, however, could not be secured unless men were free from all external coercion.*”⁶³ Madjid berpendapat bahwa Nabi Muhammad sekalipun tidak memaksakan seseorang untuk menjadi pengikut Islam. Madjid juga menegaskan tidak boleh membubarkan Konfusianisme dan berbagai mazhab di dalam sebuah kepercayaan. Ia berkata

*How do we deal with its followers? Compelling its follower to convert to other recognized religions? How far is our right to do so? Don’t all recognized religions in accordance with the Principle of One Lordship, especially Islam, teach the principle that there should not be any force in changing one’s religion?*⁶⁴

Kita bisa melihat betapa terbukanya tokoh-tokoh muslim neo modernis. Bagi mereka memaksa sebuah kepercayaan untuk diterapkan adalah sebuah kemustahilan. Mereka merasa percaya diri bahwa Pancasila memberikan ruang kepada siapapun dan dari mazhab apapun. Pancasila justru menjadi paripurna apabila setiap orang beragama bebas

⁵⁹Latif, *Negara Paripurna*, 38.

⁶⁰Latif, *Negara Paripurna*, 38.

⁶¹Intan, *Public Religion*, 94.

⁶²Intan, *Public Religion*, 96.

⁶³Intan, *Public Religion*, 108.

⁶⁴Intan, *Public Religion*, 109.

mengekspresikan agamanya, termasuk memproklamasikannya. Intan menyampaikan fakta sebagai berikut: “*Neo modernist went on to argue that religious rights include not only freedom to manifest one’s religion or belief. People will not enjoy the former freedom fully unless they are allowed to take the latter freedom freely.*”⁶⁵ Effendi mengatakannya demikian:

*Religious proselytisation is a natural and necessary phenomenon. Islam and Christianity, for example, place great stress upon this. Their adherents have a religious obligation in regard to this. Apart from that, practicing of following a particular religion implies accepting and living out certain things which are regarded as being exclusively true and pertaining to salvation both in this world and in the world to come. Because of this it is something very much according to character when somebody who is religious feels called to save other people through the embracing of a religion which they are convinced offers the only way of salvation. This means that proselytisation is essentially based upon a very noble motivation, namely to call people to salvation. In fact, proselytisation is a consequence, and a part of, religiosity itself.*⁶⁶

Pemberitaan Injil atau penyiaran agama adalah hal yang natural dalam kehidupan keagamaan. Justru di sinilah letak nilai-nilai agama yang bermartabat. Masing-masing pihak menginginkan keselamatan bagi sesamanya. Sebab konsekuensi keagamaan adalah pemberitaan atau penyiaran agama. Effendi juga mengatakan, “*If we reject the right to change one’s religion, indeed we have to refuse those who want to join our religion...*”⁶⁷

Intan memandang penginjilan sebagai tindakan positif dan tidak melanggar hukum sebab masing-masing warga negara berhak me-

manifestasikan imannya di hadapan publik. Intan berkata,

*While the first general assembly of the World Council of Churches (WCC) in Amsterdam called for the establishment of an international Bill of Human Rights ... it was made clear that the Bill should include religious freedom—freedom to manifest one’s religious beliefs—as well as freedom to change one’s religion or belief.*⁶⁸

Secara konsensus dalam bingkai Pancasila, gereja boleh memberitakan Injil dan siap untuk menerima petobat-petobat baru. Dengan kata lain gereja juga harus siap apabila harus kehilangan anggota jemaatnya yang menganut iman kepercayaan yang lain.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa Pancasila memberikan ruang bagi kepercayaan apapun termasuk bagi kaum evangelikal. Kaum neo-modernis memiliki doktrin yang mirip dengan kaum evangelikal, bahwa jalan menuju sorga bersifat tunggal. Hal ini bukan sesuatu yang mencederai kebersamaan dalam kebhinekaan. Justru di dalam keyakinan tersebut terkandung itikad baik sehingga sesama umat manusia di Indonesia bisa sama-sama masuk ke dalam sorga.

Kaum evangelikal memiliki kerinduan yang sama dengan Islam neo-modernis yang mendambakan kehidupan yang baik bagi umat manusia di masa kini maupun di masa depan (kekekalan). Kerinduan semacam ini sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila (kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi dan keadilan). Justru kerinduan ini akan menyuburkan nilai-nilai Pancasila tersebut.

Siapa saja berhak untuk berteologi asalkan nilai-nilai teologis itu tidak bertabrakan dengan keamanan dan keteraturan kehidupan bermasyarakat yang tercakup dalam sila ke-

⁶⁵Intan, *Public Religion*, 110.

⁶⁶Intan, *Public Religion*, 110-111.

⁶⁷Intan, *Public Religion*, 111.

⁶⁸Intan, *Public Religion*, 189.

dua sampai kelima. Para pemikir neo-modernis sendiri memiliki pemikiran yang adaptif dengan Pancasila. Mereka lebih memikirkan keberadaan Islam untuk tetap eksis di bumi Indonesia, seolah mereka tidak khawatir bila jumlah umat Islam berkurang. Intan memberikan analisisnya, “*Neo-modernist’s enthusiasm for Indonesia nationalism, however, came primarily from their theological and political thought.*”⁶⁹

Hal ini juga yang menjadi perhatian penulis. Penulis yakin bahwa kaum evangelikal memiliki beban agar kekristenan tetap eksis di bumi Indonesia dan tidak khawatir bila jumlah kekristenan itu sendiri berkurang. Antusiasme ini lahir dari pemikiran teologis kaum evangelikal dan sejalan dengan praksisnya.

**KESIMPULAN:
PERJUMPAAN TEOLOGIS-PRAKTIS
GEREJA EVANGELIKAL INDONESIA
DENGAN PANCASILA**

Dari penguraian dan analisis sejarah serta pemikiran evangelikal di atas, yang kemudian dilanjutkan dengan penguraian sejarah terbentuknya dan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menemukan beberapa kesimpulan sebagai “buah perjumpaan” teologis dan praktis dari gereja evangelikal dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama, sifat eksklusif dalam konsep teologi evangelikal tentang finalitas Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, tidak serta merta membangun sikap tertutup dan menghindari dialog dengan anggota masyarakat yang berbeda iman di Indonesia. Kedua dokumen CTC dan CWMRW pula menjadi pedoman penting, di samping Alkitab, agar kaum evangelikal global dan Indonesia secara aktif membangun relasi persahabatan atau persaudaraan dengan umat yang beragama lain.

Kedua, pandangan teologis gereja evangelikal di Indonesia untuk memberitakan Injil,

bukanlah sebuah perintah yang menciderai nilai-nilai Pancasila yang toleran terhadap agama-agama lain. Pemberitaan Injil seharusnya dilihat sebagai upaya membangun akhlak manusia Indonesia. Bahkan para pemikir Islam neo-modernis Indonesia menerima penyiaran agama sebagai sebuah upaya membangun masyarakat yang harmonis. Gus Dur, sebagai tokoh dan simbol toleransi Indonesia, menegaskan demikian:

*Christianity has its christian worldview. Indeed, there is a kind of competition among these groups to influence the state. That’s fine. The most important thing to be remembered is that any worldview contributed by of each group should not be in the form of formal ideology. In other words, it is akhlak (behavior) or ethical foundation of nation life that we try to color with the Islamic worldview. This is our duty.*⁷⁰

Ketiga, dengan memperhatikan komitmen gereja-gereja evangelikal seluruh dunia untuk merespons panggilan Allah, yaitu secara intensional membangun persahabatan dan persaudaraan dengan sesama umat manusia yang berbeda agama, gereja evangelikal di Indonesia perlu secara kelembagaan menjawab panggilan ini. Gereja evangelikal justru harus memanfaatkan nilai-nilai Pancasila sudah sangat terbuka memberi ruang kepada seluruh elemen bangsa untuk berperan dalam pembangunan kerukunan antar umat beragama. Harus diakui bahwa sebagian gereja evangelikal di Indonesia masih memiliki semacam keengganan dalam berinteraksi dan berdialog penuh kekeluargaan dengan elemen bangsa yang lain, yang dalam hal ini berbeza agama. Maka, kalimat-kalimat penyelesaian sekaligus pengharapan dari CTC berikut ini (IIC.1) hendaknya menjadi sebuah refleksi bersama bagi gereja evangelikal di Indonesia: “*We repent of our failure to seek friendships with people of Muslim, Hindu,*

⁶⁹Intan, *Public Religion*, 189.

⁷⁰Intan, *Public Religion*, 98.

Buddhist and other religious backgrounds. In the spirit of Jesus, we will take initiatives to show love, goodwill and hospitality to them.”

PERNYATAAN PENULIS

Kontribusi dan Tanggung Jawab Penulis

Penulis menyatakan telah memberikan kontribusi substansial untuk perancangan dan penulisan hasil penelitian. Penulis bertanggung jawab atas analisis, interpretasi dan diskusi hasil penelitian. Penulis telah membaca dan menyetujui naskah akhir.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan apa pun yang dapat memengaruhinya dalam penulisan artikel ini.

REFERENSI

- Aritonang, Jan S. dan Karel Steenbrink. “The Spectacular Growth of the Third Stream: The Evangelicals and Pentecostals.” Dalam *A History of Christianity in Indonesia*. Diedit oleh Jan S. Aritonang dan Karel Steenbrink, 867-902. Leiden: Brill, 2008. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004170261.i-1004.203>.
- Aritonang, Jan S. *Berbagai Aliran di dalam dan di Sekitar Gereja*. Jakarta: Gunung Mulia, 1995.
- Barr, James. *Fundamentalisme*. Diterjemahkan oleh Stephen Suleeman. Jakarta: Gunung Mulia, 1996.
- Darmaputera, Eka. *Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya*. Jakarta: Gunung Mulia, 1997.
- Hindmarsh, Bruce “What Is Evangelicalism?”, *Christianity Today*, 14 Maret 2018. <https://www.christianitytoday.com/ct/2018/march-web-only/what-is-evangelicalism.html>.
- Intan, Benyamin Fleming. *Public Religion and Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis*. New York: Peter Lang, 2006.
- Kärkkäinen, Veli-Matti. *An Introduction to the Theology of Religions: Biblical, Historical and Contemporary Perspectives*. Downers Grove: InterVarsity, 2014.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas, dan Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2021.
- Mamahit, Ferry Y. “Sikap Ekumenikal dan Evangelikal terhadap Agama-agama Lain: Sebuah Analisis Perbandingan Historis-Teologis,” *Dunamis: Jurnal Penelitian Teologi dan Pendidikan Kristiani* 5: 1 (2020): 71-92. <https://doi.org/10.30648/dun.v5i1.329>.
- Monsma, Stephen V. “What is an Evangelical? And Does It Matter?”, *Christian Scholar’s Review* XLVI:4 (Summer 2017), diakses 19 Februari 2022. <https://christianscholars.com/issues/summer-2017/>.
- Objantoro, Enggar “Sejarah dan Pemikiran Kaum Injili di Tengah-tengah Perubahan dan Tantangan Zaman,” *Evangelikal: Jurnal Teologi dan Pembinaan Warga Jemaat* 1, no. 2 (2017): 129-138. <https://doi.org/10.46445/ejti.v1i2.77>.
- Okholm, Dennis L. dan Timothy R. Phillips. *Four Views on Salvation in A Pluralistic World*. Grand Rapids: Zondervan, 1996.
- Siahaan, Harls Evan “Karakteristik Pentakostalisme Menurut Kisah Para Rasul,” *Dunamis: Jurnal Penelitian Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 1 (2017): 12-28. <https://doi.org/10.30648/dun.v2i1.132>.
- Stott, John. *Evangelical Truth: A Personal Plea for Unity, Integrity and Faithfulness*. Cumbria: Langham Global Library, 2013.
- Wim, Chandra. “The Chronicles of Evangelicalism: Sebuah Pengantar Historis Terhadap Gerakan Evangelikal,” *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 12, no. 2 (Oktober 1, 2011): 185–207. <https://doi.org/10.36421/veritas.v12i2.249>.

Winarjo, Hendra. “Menuju Satu Tubuh dengan Berbagai Anggota: Sikap Kaum Injili untuk Memediasi Konflik yang Berpotensi Muncul Akibat Keragaman

Denominasi Gereja di Indonesia.” *Jurnal Amanat Agung* 16, no. 2 (2020): 255-283. <https://doi.org/10.47754/jaa.v16i2.495>.